

BAB II

TINJAUN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Untuk menyempurnakan hipotesis yang digunakan dalam pemeriksaan terarah, penulis menggunakan penelitian awal ini sebagai salah satu referensi saat melakukan penelitian. Dari pemeriksaan sebelumnya, pencipta tidak melacak penelitian dengan judul yang sama di lokus eksplorasi yang diambil pencipta. Meskipun demikian, para kreator mengangkat beberapa kajian sebagai acuan dalam menyempurnakan materi ulasan dalam eksplorasi kreator. Tercatat sebagai hard copy penelitian ini pencipta memanfaatkan tiga pemeriksaan sebelumnya yang berguna sebagai referensi, yaitu:

Pertama, Penelitian Yang Berjudul Analisis Efektifitas Pemanfaatan Kartu Kusuka dalam Rangka Pemberdayaan Nelayan (Studi Kasus Kampung Nelayan Untia Kecamatan Bringkanaya Kota Makassar)¹. untuk mengetahui bagaimana pemancing melihat penggunaan kartu kusuka dalam mendukung kegiatan usaha. serta untuk mengetahui seberapa sukses pemanfaatan kartu pemancing dalam program pemberdayaan nelayan di Kampung Nelayan Untia Kecamatan Bringkanaya Kota Makasar.

¹ Menurut Bismar Himawan (Jurnal Ponggawa 2021)

Penelitian ini menggunakan Teori analisis efektifitas, yaitu memberikan kemampuan dan informasi yang spesifik, variasi iklim, Pengenalan terhadap norma atau aturan yang ada. penelitian yang digunakan dalam eksplorasi ini menjelaskan. Hasil review didapat, khususnya kesan para pemancing terhadap kartu kusuka di kota nelayan Untia, khususnya keberadaan kartu kusuka ini sangat penting dan sangat mendukung para pemancing mulai dari mendapatkan bantuan hingga kemudahan dalam mengikutinya. program Dinas Usaha Kelautan dan Perikanan, sehingga kartu kusuka ini memberikan banyak keuntungan yang sudah dirasakan oleh para nelayan. Keberlangsungan kartu kusuka di kampung nelayan Untia berjalan lancar karena dapat membantu aktivitas nelayan dalam melaut dan adanya *person in Charge* yang bertanggung jawab menangani kartu kusuka jika ada masalah yang dihadapi oleh nelayan. Ada kesamaan dan kontras dalam ulasan ini. Yaitu Kemiripannya terletak pada sama-sama mengeksplorasi Kartu Kusuka menggunakan strategi grafis subjektif. Hal yang penting adalah hipotesis yang digunakan dalam ulasan ini.²

Kedua, Penelitian dengan judul pemeriksaan Administrasi Pengurus Kusuka (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan) Pada Administrasi Perikanan Terkait Pemenuhan Nelayan di Wilayah Tulang Bawang.³ Peneliti mengatakan belum banyak nelayan yang mendaftar di Kartu Kusuka di kabupaten Tulang Bawang sangat sedikit, relatif sedikit nelayan yang

² Diakses melalui jurnal Untoro, et.al. 2010 of fisheries socio-economic.id ponggawa, halaman 357 pada tanggal 12 Juni 2023

³ Penelitian Eka Saputra Alamsyah, Iskandar ali alam, Hendri Dunan pada tahun 2021

mendaftar di kartu Kusuka karena beberapa faktor, misalnya tidak memahami dan tidak menyadari kelebihan yang diberikan oleh kartu Kusuka. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui manajemen pelayanan terkait Program Kartu Kusuka.

Hasil penelitian yakni kepuasan nelayan terhadap Kartu Kusuka di Kabupaten Tulang Bawang pada tingkat kepuasan nelayan mayoritas merasa puas berdasarkan hasil jawaban responden. Namun, ada beberapa poin yang di raa nelayan belum menunjukkan hal yang memuaskan yakni jika di lihat dari kuisioner bahwa tingkat ketidakpuasan nelayan pada permasalahan pemberian informasi yang belum maksimal khususnya mengenai Kartu Kusuka, pelayanan Kartu Kusuka yang masih di rasa nelayan berbelit-belit atau tidak sederhana khususnya mengenai system online. Strategi kebijakan untuk meningkatkan kepuasan nelayan yakni dengan melakukan langkah-langkah strategi yakni mampu memberikan jasa yang telah dijanjikannya secara akurat dan terpercaya. Kinerja jasa harus sesuai bahkan melebihi harapan nelayan. Melakukan tindakan yang responsive (cepat tanggap) terhadap nelayan, memberi pelayanan yang cepat kepada nelayan, bersikap proaktif, tidak menunggu sampai nelayan mengeluh dalam menggunakan pelayanan. Pegawai mampu memberikan penjelasan serta informasi yang jelas kepada nelayan yang ingin menggunakan pelayanan Kartu Kusuka serta memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para nelayan untuk menyampaikan saran, kritik, pendapat dan keluhan mereka. Adapun rekomendasi yaitu Dinas Perikanan

Kabupaten Tulang Bawang dapat melakukan kajian dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap kepuasan nelayan di Kabupaten Tulang Bawang sehingga tingkat kepuasan nelayan dapat diukur dan menjadi dasar bagi Dinas Perikanan Kabupaten Tulang Bawang untuk melakukan kebijakan strategis yang efektif. Persamaan dalam riset ini bersama mempelajari tentang pelayanan pengaduan warga. Sebaliknya perbedaannya terdapat pada teori penelitiannya.⁴

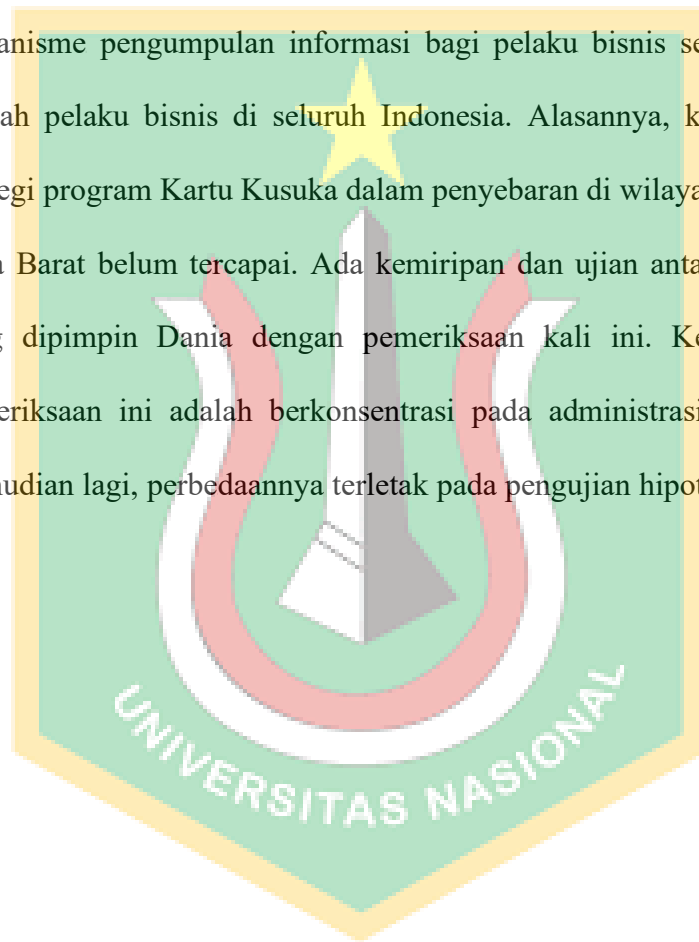
Ketiga, Penelitian dengan judul efektivitas pelaksanaan kebijakan program Kartu KUSUKA di wilayah barat Provinsi Jawa Barat.⁵ Dania berkata pelaksanaan kebijakan program kartu kusuka dalam distribusinya di wilayah barat provinsi Jawa Barat. Sudah sesuai harapan masyarakat apa belum oleh kementerian kelautan dan perikanan.

Konsekuensi dari kajian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan strategi program kartu kusuka dalam penyampaian di wilayah Jawa Barat wilayah barat belum sesuai dengan asumsi. Sifat keuntungan dari kartu kusuka belum dirasakan oleh pelaku bisnis sama sekali. Waktu pengurusan penerbitan kartu kusuka nyaris membuat pelaku usaha putus asa karena mitra kerap meminta informasi. Keyakinan aktivitas manfaat kartu kusuka sangat diharapkan oleh para pelaku bisnis. KKP melalui buruh perluasan hendaknya menjadwalkan ulang pengumpulan data kartu kusuka bagi pelaku bisnis yang belum mendapatkan kartu tanpa menyebutkan informasi

⁴ Diakses melalui jurnal visionist, volume 10, nomor 1. pada tanggal 12 Juni 2023

⁵ Penelitian Daniarsyah pada tahun 2020

atau menyelesaikan struktur lagi. Agar sifat keunggulan kartu kusuka dapat segera dirasakan oleh para pelaku bisnis, maka Bank diminta untuk memperluas kerjasamanya dengan para pelaku bisnis secara sungguh-sungguh. Selidiki organisasi dengan bank lokal, seperti BJB, untuk kartu kusuka. Meskipun demikian, Kartu Kusuka dapat berfungsi sebagai mekanisme pengumpulan informasi bagi pelaku bisnis sehingga tercatat jumlah pelaku bisnis di seluruh Indonesia. Alasannya, keberlangsungan strategi program Kartu Kusuka dalam penyebaran di wilayah barat wilayah Jawa Barat belum tercapai. Ada kemiripan dan ujian antara penjelajahan yang dipimpin Dania dengan pemeriksaan kali ini. Kesamaan dalam pemeriksaan ini adalah berkonsentrasi pada administrasi protes warga. Kemudian lagi, perbedaannya terletak pada pengujian hipotesis.⁶



⁶ Diakses melalui *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)*, pada tanggal 12 Juni 2023

Tabel 2. 1
penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti / Tahun penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
A.	Bismar Himawan/2021	Analisis Efektifitas Pemanfaatan Kartu Kusuka dalam Rangka Pemberdayaan Nelayan (Studi Kasus Kampung Nelayan Untia Kecamatan Bringkanaya Kota Makassar).	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan penelitian kualitatif. - Membahas tentang penerapan Kartu KUSUKA. 	<ul style="list-style-type: none"> - Objek penelitiannya berbeda. - Teori yang digunakan berbeda.
2.	Eka Saputra Alamsyah, Iskandar ali alam, Hendri Dunan/tahun 2021	Analisis manajemen pelayanan kusuka (kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan) di dinas perikanan terkait kepuasan nelayan di kabupaten tulang bawang.	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat persamaan, yaitu pada metode penelitian kualitatif. - Meneliti tentang pelayanan kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan 	Penelitian ini mendeskripsikan tentang strategi pelayanan satu pintu dalam menangani pengaduan darurat
3.	Dida Daniarsyah /2020	Efektivitas pelaksanaan kebijakan program Kartu Kusuka di wilayah barat Provinsi Jawa Barat.	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat persamaan, yaitu Penelitian menggunakan metode kualitatif - Meneliti tentang program kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan 	Teori yang digunakan.

Sumber: Di olah oleh Peneliti pada Tahun 2023

Dari peneliti terdahulu yang dijelaskan diatas terdapat perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti yang dilakukan oleh penulis yakni terletak pada fokus yang berbeda. Dari ke tiga peneliti terdahulu berfokus pada aspek kualitas pelayanan publik secara keseluruhan di masyarakat nelayan, sedangkan peneliti menulis secara spesifik tentang Kartu Pelaku Usaha Kementrian Kelautan dan Perikanan Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan menggunakan keadaan yang baru serta informan yang lebih luas.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1. Inovasi

Everret Rogers melihat kemajuan sebagai pemikiran, praktik atau barang yang dipandang sebagai novel, hal baru oleh seseorang. Inovasi masuk wilayah persepsi yang memungkinkan perbedaan pandangan antara satu individu, komunitas masyarakat atau sistem sosial dengan lainnya dalam memandang sebuah inovasi.⁷ Adopsi Inovasi adalah satu proses mental ataupun perubahan perilaku yang berupa pengetahuan (kognitif), pola pikir (afektif), dan keterampilan (psikomotor) dalam diri seseorang sejak dia menyadari inovasi tersebut sampai dia mengambil keputusan hingga mengadopsinya sesudah menerima inovasi tersebut. Definisi yang hampir sama juga disampaikan oleh Soekartawi⁸ yang mengatakan adopsi adalah cara mental individu

⁷ Everret Rogers dalam Sholahuddin (2017)

⁸ Soekartawi didalam Agustina Abdullah (2008)

melalui pertama-tama mendengarkan satu inovasi hingga cepat atau lambat mengadopsinya.⁹Kata dari inovasi berasal dari bahasa Inggris (*innovation*) yang artinya membarui kembali. Pembangunan memiliki arti membangun dan menyegarkan serta mencirikan secara luas dan menggunakan rencana terobosan untuk membuat produk, siklus, dan administrasi baru dan tingkat tinggi.¹⁰

Penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan subjektif, sesuai dengan.¹¹ Eksplorasi subyektif adalah strategi untuk menemukan dan memahami implikasi yang dipandang oleh berbagai individu atau asosiasi sebagai masalah yang ramah atau filantropis. Strategi pemeriksaan subyektif memerlukan usaha dasar, di samping mengajukan pertanyaan prosedural, mengumpulkan informasi yang sesuai dari anggota, membaca informasi secara induktif dari topik yang dimaksudkan untuk umum, dan menguraikan pentingnya data. Pembeneran untuk menggunakan strategi pemeriksaan subyektif adalah agar para ahli dapat menemukan lebih detail dan kedalaman cara yang paling umum dalam mengambil perkembangan yang dilakukan oleh Dinas Usaha Kelautan dan Perikanan. melalui realitas kumpul-kumpul menggunakan teknik pemeriksaan kualitatif.¹²

⁹ JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS) Vol.1, No.3 September 2022

¹⁰ Everett M Rogers, *Diffusion Of Innovations*, 5th ed. New York: FREE PRESS, 2003,

¹¹ metode penelitian kualitatif Creswell (2013:4-5),

¹² *Ibid*

2.2.2. Inovasi Pada Sektor Publik

Menyatakan Dikatakan bahwa dengan berkembangnya transformasi pelayanan maka pemerintah sebagai penyedia pelayanan harus berinovasi untuk mewujudkan tujuan dan hasil dalam pelaksanaannya. Pelayanan publik dapat menjadi semakin lebih baik lagi. Peran maupun partisipasi masyarakat dalam perubahan ini juga merupakan hal penting guna misi pemberdayaan.¹³

2.2.3. Teori Inovasi

Penyebaran pembangunan merupakan bagian dari strategi pembangunan, diseminasi sendiri mempunyai arti yaitu diseminasi adalah arah kemajuan yang disampaikan melalui saluran-saluran dalam jangka panjang oleh individu-individu dari suatu kerangka sosial. Ini adalah jenis korespondensi yang unik, untuk situasi ini pemikiran yang inovatif. Korespondensi adalah kursus membuat anggota dan menyampaikan data satu sama lain. Untuk mencapai kolaborasi. Definisi ini menunjukkan bahwa korespondensi adalah kombinasi (atau perbedaan) karena setidaknya dua orang bertukar data untuk bergerak menuju yang lain (atau diskrit) karena mereka menambah kesempatan tertentu. Kami menganggap korespondensi sebagai proses pembauran dua arah. Bukan jalur aktivitas satu arah di mana satu individu mencoba

¹³ *Ibid*

untuk memindahkan pesan ke satu lagi untuk mencapai sesuatu yang tertentu ¹⁴

Dalam garis pemikiran ini manusia menyampaikan dapat dengan tepat menggambarkan demonstrasi menyampaikan atau kegiatan yang terlibat dengan penyebaran. Misalnya, ketika spesialis perubahan mencari cara meyakinkan klien untuk mengambil kemajuan. Namun, ketika kita melihat apa yang terjadi sebelum peristiwa itu, kita memahami bahwa bagian itu hanyalah satu bagian dari siklus total di mana data diperdagangkan antara dua orang, misalnya klien mungkin datang ke spesialis perubahan dengan masalah dan perkembangan diberikan sebanyak mungkin pengaturan yang diperlukan. Koneksi klien spesialis perubahan mungkin berlangsung di utara beberapa siklus, seperti perdagangan data informasi.¹⁵

Jadi diseminasi adalah jenis korespondensi yang unik melalui saluran pemikiran baru. Pemikiran dalam konten saluran inilah yang memberikan penyebaran karakter yang luar biasa. Dispersi adalah semacam perubahan bersahabat, yang dicirikan sebagai siklus di mana salah satu pilihan terjadi dalam konstruksi dan kemampuan kerangka sosial.

¹⁴ Rogers dan Kincaid, 1981

¹⁵ Skripsi Fera Juliana Fajar (2019) difusi inovasi desa terpadu mandiri (studi kasus: desa terpadu mandiri di kabupaten luwu utara) hal 7., makasar

Menurut Roger ada beberapa tahapan dalam pemilihan suatu pengembangan, yaitu tahapan utama adalah informasi atau informasi, tahapan selanjutnya adalah pengaruh, tahapan ketiga adalah pilihan, tahapan keempat adalah eksekusi dan tahapan kelima adalah afirmasi. Dispersi adalah siklus yang berisi perkembangan yang disampaikan melalui berbagai saluran yang terjadi di antara individu dalam kerangka sosial tertentu. Premis dari unit proses diseminasi kemajuan adalah bahwa ada penambahan pembangunan ke dalam berbagai kegiatan, penegasan, siklus korespondensi dan praktik yang diterima dan desain sosial untuk mengurangi kerentanan yang dialami oleh pengadopsi kemajuan.

Dalam pengertian bebasnya, diseminasi adalah suatu siklus di mana pembangunan disampaikan melalui saluran-saluran yang berbeda dalam jangka waktu tertentu dalam suatu kerangka sosial. Dari definisi yang dikemukakan oleh Rogers ternyata sifat dasar dari suatu kemajuan adalah faktor keganjilan. Artinya, suatu pembangunan harus merupakan suatu pemikiran, gagasan atau praktik yang benar-benar dipandang baru bagi daerah pengadopsi tujuan. Terlepas dari kenyataan bahwa keanehan adalah kebutuhan langsung untuk suatu perkembangan, keingintahuan akan kemajuan itu abstrak. Suatu perkembangan boleh jadi bukan merupakan ciptaan lain, melainkan dianggap sebagai hal yang baru karena tidak pernah diambil kemajuannya secara bersama-sama. Ketika sebuah pemikiran, gagasan

atau sebaliknya amalan dianggap baru dan dapat membawa perubahan ke keadaan yang lebih baik bagi suatu perkumpulan maka itu disebut pembangunan, namun dengan anggapan pemikiran, pemikiran atau amalan tersebut di atas tidak dipandang baru oleh perkumpulan tertentu maka pemikiran tersebut, pikiran atau praktik bukanlah perkembangan.

Berikut ciri-ciri inovasi yang dirasakan oleh para anggota suatu sistem sosial menentukan tingkat adopsi.

1. **Relative Advantage (keuntungan relatif)** adalah seberapa besar perkembangan dipandang lebih baik daripada pemikiran lain yang menggantikannya. Harus ada rasa ingin tahu menghargai bawaan dalam pengembangan yang merupakan merek dagang yang mengenalinya dari model masa lalu. Hasil dari inovasi yang diterapkan adalah modifikasi atau penyempurnaan sistem yang sudah ada, yang dapat dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan bisnis dapat tetap kompetitif dan memuaskan pelanggan. Siklus dan konsekuensi dari suatu objek imajinatif juga harus dapat diperhatikan, ditiru, dan diubah. Selain itu, penting bahwa setiap desain inovasi layanan publik direncanakan dengan cermat sebelum diimplementasikan. sehingga inovasi dan metode tertentu dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dianggap perlu diperbaiki.

2. **Compability (kesesuaian)** menyiratkan kesamaan yang stabil dengan kualitas dan praktik yang ada, pengalaman sebelumnya, dan persyaratan dari kemungkinan penghubung. Pemikiran yang bertentangan dengan kualitas dan standar praktik mereka tidak akan disesuaikan secepat perkembangan yang layak. dimana perkembangan dirasakan dapat diandalkan dengan kesamaan kualitas, perjumpaan dan kebutuhan orang-orang yang memeluknya. Ini direncanakan agar individu tidak tercengang dengan model bantuan baru, dan perubahan vital diperlukan.

3. **Complexity (Kerumitan)** karena perkembangan lain yang umumnya tingkat kerumitannya lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi perkembangan baru harus memiliki pilihan untuk menawarkan hal-hal yang lebih unggul dari yang sebelumnya.

4. **Trialability (Kemungkinan dicoba)** Hal ini diharapkan dengan tujuan agar perkembangan lama tidak dibuang, dan kemajuan lama menjadi penting untuk interaksi perubahan ke kemajuan baru. Hal ini diharapkan agar individu tidak terkejut dengan model bantuan yang baru, dan perubahan penting diperlukan.

5. **Observability (dapat diamati)** bahwa pembangunan harus memberikan keterkenalan, baik sejauh fungsinya maupun hasil yang ditunjukkan menjadi lebih baik. Hasil pengembangan dapat dirangkul dan diciptakan kembali dari tempat lain. Sehingga dengan berkembangnya pelaksanaan regulasi di ruang publik

sangat mungkin dimanfaatkan di berbagai organisasi, hal ini penting mengingat hasilnya harus terlihat bahwa kemajuan memiliki kehandalan.¹⁶

2.5 Digital Public Services

2.5.1 Pengertian Digital Public Services

Administrasi publik yang terkomputerisasi pada periode keresahan modern 4.0 adalah sebuah kebutuhan. Gagasan administrasi publik yang maju mendorong standar yang kuat dan mahir. Kuat berarti selalu mencari tahu sementara produktif berarti selalu mencari tahu. Administrasi publik pada tingkat yang paling minimal berada pada tingkat RT dan RW sebagai inisiator dalam memutuskan apakah wajib pajak mendukung prakarsa, baik pusat maupun provinsi. RW memainkan peran yang sangat besar dalam mencapai tujuan dan fokus dari inisiatif yang didukung wajib pajak karena RW adalah yang paling memperhatikan keadaan saat ini dalam keadaan penghuninya saat ini.¹⁷

Digitalisasi Indonesia saat ini berada dalam tahap digitalisasi dengan menggunakan inovasi data dan korespondensi dengan siklus bisnis untuk memperoleh manfaat dari konten digital. Di era komputerisasi yang sedang berlangsung saat ini, dibutuhkan para pionir yang dinamis dan melakukan banyak pengembangan terkait dengan inovasi yang canggih. Dalam administrasi publik yang maju cenderung

¹⁶ Everett M Rogers, Halaman 98–99.

¹⁷ Cabrilo et al., 2014, Almsalam, 2014; Gures et al., 2014; Utami, 2015 Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Melalui Digitalisasi Vol. 3, No. 1, Tahun 2021, Jurnal Altasia

dikenal dengan pemanfaatan media selain memanfaatkan kertas yang bisa disebut paperless. Inovasi ini berperan penting agar penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dapat berjalan dengan baik. Melihat bahwa saat ini hampir semua orang menggunakan atau menyelesaikan latihan dengan menggunakan handphone, maka dari itu terdapat kemudahan oleh setiap orang untuk mengakses informasi secara mudah melalui teknologi handphone yang dimilikinya. Jika sudah masuk dunia digitalisasi untuk pelayanan public mampu mengubah bisnis menjadi efisien dan efektif serta menguntungkan contoh praktiknya adalah masyarakat mengunggah data atau informasi ke website dan membagikannya ke instansi pemerintahan agar dapat diakses dan diproses secara bersamaan lalu di analisis untuk keperluan pelayanan public.¹⁸

Kemajuan teknologi data dan korespondensi telah menyebabkan Administrasi Publik Terkomputerisasi merasa berguna, namun di pemerintah daerah tidak hanya pada tahap distribusi situs oleh otoritas publik atau hanya pada tahap memberikan data terbatas dan pertukaran elektronik. Padahal tidak hanya itu, Computerized Public Administration juga harus menjawab semua kebutuhan daerah, berperan dalam penyusunan strategi dan mendukung kantor-kantor wacana publik dan pemerintah sehingga ada kejelasan antara otoritas publik dan daerah.

¹⁸ *Ibid*

Mengenai Pedoman Pemimpin Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003, DPRD Parepare memberikan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Berbasis Inovasi Data dan Persuratan yang bermaksud menjadikan masyarakat data, mengingat kekuasaan digerakkan oleh pemerintah provinsi melalui kantor, koordinasi, pelatihan dan pengawasan dan mengharapkan untuk bekerja pada administrasi terbuka dan jaminan publik di jalur yang benar untuk mengetahui pengaturan, program kebijakan, proses serta alasan pengambilan keputusan publik, dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.¹⁹

2.5.2 Penerapan Digital Public Services

Perkembangan sistem informasi yang diciptakan oleh pemerintah sudah termasuk dari program pemerintah untuk menuju perubahan pada setiap aspek dalam kehidupan. Kemampuan sistem teknologi dan informasi menjadi mampu menintegrasikan beberapa aspek kehidupan dapat sangat cepat dan efektif untuk mengubah pola kebutuhan masyarakat ke arah condong ke universal dan tanpa terbatas oleh ruang dan waktu (Ruslan, 2017). Penerapan Digital Public Services dalam perkembangan pelayanan public digital yang dikembangkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPK) Pemerintah Kota Mojokerto yang berupa Sistem Monitoring Pelayanan dan Perizinan Online

¹⁹ Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 tahun 2017

(SIMOJO) merupakan sebuah sistem untuk mengurus suatu perizinan dengan berbasis website maupun aplikasi termasuk teknologi One Single Submission. Pelayanan OSS ini bertujuan untuk meningkatkan mekanisme perizinan yang sudah direncanakan oleh pemerintah secara transparansi, efisien, efektif, dan menghindarkan dari kegiatan praktik pungli serta korupsi diantara pegawai dengan masyarakat yang terjadi di lingkungan pemerintahan. Dikarenakan bahwa dalam ruang lingkup sektor perizinan sering kali dijumpai banyak pelaku oknum yang menyelewengkan tindakan korupsi.

2.6 Tinjauan tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

(Kusuka)

2.6.1 Pengertian Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

(Kusuka)

Kartu Kusuka Dalam Pedoman Pendeta Usaha Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2016, Nelayan adalah orang yang pekerjaannya menangkap ikan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2019 merupakan landasan hukum pelaksanaan kegiatan Kartu Kusuka baik di Pusat maupun di daerah. Sebelumnya KKP telah memberikan beberapa kartu kepribadian ahli untuk setiap Penghibur Bisnis mengingat Unit eselon I khusus.

Kartu Kusuka diberikan oleh Dinas Usaha Kelautan dan Perikanan, dengan peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan sebagai landasan hukum. Kartu Kusuka ini ditujukan untuk perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan efisiensi program Kementerian Kelautan dan Perikanan agar tepat sasaran dan pendataan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Di dalam Kartu Kusuka terdapat berbagai informasi berupa:

- a. Nama pelaku usaha
- b. Profesi pelaku usaha
- c. Alamat pelaku usaha
- d. Nomor Induk Kependudukan Orang Perseorangan
- e. Masa berlaku
- f. Kode QR Identitas dan Informasi Tambahan di Kartu Kusuka

yaitu:

- a) Tempat dan tanggal lahir perseorangan atau penanggung jawab korporasi
- b) Profesi tambahan pelaku usaha
- c) Tahun register
- d) Nomor telepon
- e) Sarana dan prasarana produksi yang digunakan

Sasaran utama yang mendapatkan kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan ialah:

- a. Nelayan terdiri dari Nelayan kecil, Nelayan buruh, penggarap lahan, dan nelayan pemilik.
- b. Pembudidaya ikan terdiri dari pembudidaya ikan kecil, pembudidaya lahan, dan pemilik lahan.
- c. Peternak garam terdiri dari peternak garam kecil, pembudidaya danau garam, dan pemilik danau garam Pengolah ikan.
- d. Pemasar perikanan.
- e. Penyedia jasa pengiriman produk kelautan dan perikanan.

Keberhasilan suatu program kegiatan dapat dilihat dari kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaannya, terukur atau akuntabel hasilnya, serta ada keberlanjutan aktivitas yang merupakan dampak dari program itu sendiri. Program kartu kusuka saat ini telah berjalan hampir 5 tahun. Namun harapan untuk mendistribusikan Kartu Kusuka ke seluruh sasaran Pelaku Usaha bidang kelautan dan perikanan belum maksimal.

Kartu Kusuka dibuat untuk memudahkan pelaku usaha mendapatkan modal usaha dari bank. Menurut Sekjen KKP Nilanto Perbowo, dari pada meminjam kepada rentenir yang bunganya bisa 200%, dengan Kartu Kusuka mereka bisa mendapatkan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah. Selain berisi informasi pelaku usaha sebagaimana termuat di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Kusuka

juga memuat jenis usaha yang dilakukan para pelaku usaha hingga seberapa besar skala usaha yang dijalankannya. Bahkan dengan memeriksa kode QR di bagian depan kartu, Anda dapat mengetahui pendapatan pemegang kartu. Hal ini memudahkan pelaku usaha untuk mendapatkan kredit dari bank karena profil mereka jelas terbaca dalam satu kartu. Sehingga masyarakat khususnya para pelaku usaha perikanan semakin mudah dalam perbankan sehingga semua transaksi berkumpul di kota, namun juga di pesisir pantai.

Pelaku usaha dapat menggunakan kartu Kusuka di seluruh ATM BNI. Bahkan, kartu tersebut juga sudah tergabung dengan ATM bank Himbara, Prima, dan Connection. Untuk penarikan di ATM BNI, mereka tidak dikenakan biaya apapun. Jika daerah tersebut belum memiliki ATM BNI, maka lembaga dapat mengaksesnya melalui spesialis 46 yang merupakan perluasan BNI di daerah yang jauh. Hanya dengan menyimpan Rp 20.000 bisa langsung dimulai rekeningnya.²⁰

Selama melayani para pelaku usaha kelautan dan perikanan, pendaftar maupun pengguna kartu Kusuka, Staf pelaksana harus memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing, khususnya dalam input informasi dan memahami satu informasi dari pusat pemerintahan sehingga informasi yang dimasukkan cukup banyak dan dapat diterima. dicetak, kemudian, pada saat itu, divisi penguatan pelaku bisnis agar dapat memahami bagaimana cara melibatkan pelaku bisnis kelautan

²⁰ Di akses melalui website ekonomi.kompas.com/read/2018/10/08//kartu-kusuka-permudah-nelayan-dan-pemasar-ikan-dapat-pinjaman-modal pada tanggal 20 Juni 2023

dan perikanan. Dalam bantuan bantuan kantor kepada nasabah Kartu Kusuka, komponen bantuan tenaga kerja tambahan sangat dibutuhkan dalam kesempurnaan dan kemudahan dalam pengajuan dan pemberian bantuan kantor.²¹

Dengan adanya penyuluh yang dibagi per wilayah kerja maka informasi dan pendamping tentang Kartu Kusuka dapat diketahui oleh masyarakat, Namun yang ditemukan ilmuwan di lapangan adalah jumlah tenaga kerja perluasan masih Sangatlah Kurang sehingga Partisipasi Pendaftar Kartu Kusuka dalam membantu administrasi untuk keamanan tidak ada peningkatan yang signifikan secara konsisten. Divisi Perikanan dalam menyelesaikan administrasi pengamanan pelaku usaha kelautan dan perikanan dengan menggunakan kartu Kusuka memberikan bantuan aset melalui aset APBD untuk memberikan bantuan kepada pelaku usaha pengguna Kartu Kusuka yang mengajukan permohonan bantuan, serta menyiapkan biaya untuk usaha kelautan dan perikanan pelaku usaha yang telah mendaftar dengan kartu Kusuka. Idealisme dalam proses eksekusi strategi adalah salah satu kunci dari hasil strategi yang berhasil, cara penyampaian dan survei rekomendasi yang paling umum membutuhkan waktu, maka pada saat itu, jika proposisi diberhentikan

²¹ Diakses melalui jurnal Nur arif Implementasi kebijakan kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan dikota sorong.

membutuhkan investasi yang lebih besar. untuk mengirim ulang dan siklus bantuan menjadi lebih lama.²²

2.6.2 Latar Belakang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan \ (Kusuka)

Seperti yang ditunjukkan oleh Peraturan no. 7 Tahun 2016 tentang Pengamanan dan Penguatan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam bahwa Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dalam menghadapi persoalan tantangan dalam memimpin suatu Usaha atau Bisnis Perikanan.²³

Kawasan perikanan dimungkinkan mengingat kemampuan perairan Kutai Barat yang memiliki banyak sungai, danau dan rawa. Berbagai upaya telah dilakukan oleh otoritas publik untuk memperluas wilayah kerja ini, antara lain dengan memberikan sarana budidaya ikan, sarana pengelolaan, penangkapan ikan bagi nelayan serta pelatihan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia pelaku usaha perikanan. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, telah diprogramkan Kartu Kusuka untuk menghimpun Pelaku usaha di Kawasan Kelautan dan Perikanan. Kartu ini berfungsi sebagai identitas tunggal bagi pelaku usaha dan merupakan integrasi dari Kartu dan data pelaku usaha Kelautan dan Perikanan yang telah didukung

²² *ibid*

²³ UU No. 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

sebelumnya. Kartu Kusuka ini bisa dimiliki oleh para pelaku utama kelautan dan perikanan seperti: Nelayan, Pengusaha di bidang Pembudidayaan Ikan, Pergaraman, Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Jasa Pengiriman Ikan. Kartu Kusuka ini dapat diperpanjang setiap lima tahun dan berlaku di seluruh Indonesia selama berprofesi sebagai Pelaku Usaha Perikanan Laut.²⁴

Pelaku usaha kelautan dan perikanan membutuhkan adanya identifikasi terhadap profesi mereka ini bertujuan untuk memudahkan pendataan pelaku usaha kelautan dan perikanan sehingga perlindungan, pemberdayaan, percepatan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan dapat terealisasi dengan efektif dan efisien. Untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha kelautan dan perikanan maka perlu adanya inovasi, inovasi sangat dibutuhkan dalam peningkatan dan pengembangan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, dengan adanya inovasi memberikan pengaruh terhadap masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²⁵

Pemerintahan Presiden Joko Widodo sangat berpusat pada pengakuan kualitas bantuan, keterusterangan dan kesederhanaan pelaksanaan untuk daerah setempat. Administrasi publik yang berkembang lebih lanjut adalah kecemasan otoritas publik terhadap pelaku bisnis kelautan dan perikanan, karena administrasi publik

²⁴ Diakses melalui website diskan.kutaibaratkab.go.id Pada tanggal 20 Juli 2023

²⁵ Implementasi Kebijakan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

merupakan hak sosial yang esensial dari daerah masyarakat (*social rights*) atau (*fundamental rights*).²⁶

Maka pemerintah memberikan program kartu Kusuka melalui Dinas Kelautan dan Perikanan yang merupakan perwujudan dari misi organisasi Presiden Joko Widodo. Kartu Kusuka adalah kartu yang diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Kartu Kusuka merupakan pembaharuan dari program yang lalu, yaitu Program Kartu Nelayan, yang kemudian Kartu Kusuka diarahkan untuk perlindungan dan pemberdayaan para pelaku usaha kelautan dan perikanan, mempercepat administrasi, memperluas bantuan pemerintah serta membuat kecukupan dan kelancaran Pelayanan Program Kelautan dan Perikanan sehingga sempurna dan beragam informasi untuk penghibur bisnis kelautan dan perikanan. Kartu Kusuka adalah kartu yang digunakan sebagai identitas, basis data perlindungan dan pemberdayaan, Pelayanan administrasi dan perbaikan serta untuk keperluan pengecekan strategi program kebijakan.²⁷

²⁶ Eldo & Mutiarin 2018

²⁷ *Ibid*

Penyebab kemiskinan nelayan tradisional dan pembudidaya dipengaruhi oleh sifat SDM yang ditunjukkan dengan rendahnya pendidikan sebagai tanda buruknya kualitas SDM. Penanda ini benar-benar menentukan apakah seseorang atau kelompok memiliki masalah dengan kelompok yang miskin atau tidak beruntung dengan efisiensi rendah. Efisiensi yang rendah akan mempengaruhi upah yang rendah. Sedangkan tingkat rendah pendapatan merupakan salah satu ciri dari penduduk miskin. Selain itu, faktor lainnya alasan kemiskinan diklaim posisi pilihan, kemampuan pilihan, latihan dilakukan oleh pemancing adat, tanggung jawab untuk, inovasi langsung, pekerjaan institusional, dan pencemaran lingkungan.²⁸

Kegiatan Kusuka sangat signifikan untuk KKP Satu Data sehingga menggunakan aplikasi satudata.kkp.go.id yang menggabungkan modul pendaftaran Kusuka perorangan dan perusahaan. Saat ini terdapat 5.700 pejabat Peningkatan Perikanan yang tersebar di seluruh Indonesia dengan bantuan 514 Lingkungan Kerja KP Kabupaten/Kota dan 139 UPT KKP untuk mengajukan usulan penataan data ke Modul Kusuka. Kusuka akan menjalani proses persetujuan informasi di blok Umum (sesuai sambungan KTP) dan blok luar Biasa (sesuai premis informasi yayasan yang digunakan) setelah pendaftaran Penghibur. Setelah data lolos pengesahan dan dinyatakan

²⁸ Dita Putri Deffrina, Darwis dan Ridar Hendri. Kajian Kemiskinan Rumah Tangga Nelayan Tradisional Di Pulau Buluh Keluruhan Pulau Buluh Kecamatan Bulang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, Fakultas Perikanan Dan Kelautan Universitas Riau.(2017).

signifikan, Pusdatin KKP akan menyerahkan print out kartu tersebut kepada Bank yang telah melakukan kesepakatan penyertaan agar Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan dapat tiba di bank dalam hal ini Bank Negara Indonesia (BNI). telah memberikan penyetoran uang kepada pelaku usaha yang kartunya dicetak oleh BNI, khusus membuka rekening dengan saldo Rp. 0, biaya perawatan kartu dan administrasi Rp. 0 alias gratis. Sampai dengan akhir Juli 2018, data yang masuk kedalam aplikasi satu data sebanyak 292.074, yang terdiri dari: 127.804 Nelayan, 10.344 Pemasar Ikan, 30 PPJK, 132.390 Pembudidaya ikan, 16.010 Pengelola Ikan dan 5.450 Petambak Garam.²⁹

2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah. Fokus penulis pada penelitian ini adalah Inovasi Program Kartu Kusuka, penilaian masyarakat terhadap Kartu Kusuka, dan rendahnya jumlah pelaku usaha yang mendaftarkan diri dalam Kartu Kusuka.

Berangkat dari permasalahan diatas, peneliti merujuk pada dasar hukum Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 39 Tahun 2017 sebagai alasan sah dilaksanakannya pelaksanaan Kartu Kusuka baik di tingkat Pusat maupun kewilayahan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Tata

²⁹ Diakses Melalui webiste satudata.kkp.go.id pada tanggal 26 Juli 2023

Cara, Prasyarat, dan Jaminan Pengembangan Wilayah Perikanan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, dan Pedoman Pendeta untuk Perubahan Kewenangan dan Perubahan Peraturan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perluasan Tempat-Tempat Berguna Perikanan.

Penelitian ini menggunakan indikator/dimensi inovasi milik Everret Rogers dalam Sholahuddin (2017) meliputi dimensi Relative Advantage (Keuntungan Relatif), Compability (Kesesuaian), Complexity (Kerumitan), Triability (Kemungkinan Dicoba), Observability (Kemudahan Diamati). Pemakaian teori ini untuk mengembangkan eksplorasi penulis mendapatkan jawaban dari rumusan masalah pada BAB I yaitu Inovasi Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022.





Gambar 2. 1 Kerangka berpikir

Sumber: Olahan Peneliti, 2023.